

## DPRD TERIMA RAPERDA RPKPD PALANGKA RAYA 2025-2045



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah menerima rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Palangka Raya tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota setempat Tahun 2025-2045.

"Salah satu alasan usulan raperda tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024," kata Hera pada saat menyampaikan pidato pengantar usulan raperda, di DPRD Kota Palangka Raya, Senin.

Usulan raperda tersebut disampaikan langsung oleh Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023/2024 DPRD Kota Palangka Raya.

Hera menjelaskan, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyesuaikan tahapan-tahapan di dalam perencanaan sehingga selaras dengan perencanaan secara nasional.

Usulan raperda tersebut juga sebagai upaya menindaklanjuti Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

"Raperda ini saya harapkan dapat menjadi acuan bagi kita pemerintah dan legislatif untuk bersama-sama fokus dalam membangun Kota Palangka Raya untuk lebih baik lagi," ucapnya.

Untuk itu Hera meminta kepada DPRD Kota Palangka Raya agar dapat menerima dan segera membahas usulan raperda tersebut.

Dengan demikian ke depan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan program-program yang telah disusun dapat terealisasi.

"Karena ini semua demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam sektor pembangunan di Kota Palangka Raya," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yuniyanto selaku pimpinan rapat menerima dan menyambut baik adanya raperda usulan Pemerintah Kota Palangka Raya tentang RPJPD 2025-2045.

Hal tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memperhatikan berbagai aspek pembangunan yang harus menjadi program prioritas jangka panjang.

"Terlebih sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah, sehingga perlu adanya program jangka panjang yang harus terus dilaksanakan meski nantinya terjadi pergantian kepala daerah," demikian Sigit Karyawan Yuniyanto.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/698436/dprd-terima-raperda-rpjpd-palangka-raja-2025-2045>, Senin, 3 Juni 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/342758-dprd-terima-raperda-rpjpd-palangka-raja-2025-2045>, Senin, 3 Juni 2024.

#### **Catatan:**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan dilakukan berbasis pada *e-planning*.